EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM KETERTIBAN UMUM DI DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

Intan Sofiya
NPP. 33.0295
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: intn.sfy20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ir. M. Nawawi, M.Si.
Email: m_nawawi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study focuses on the increasing number of People with Mental Disorders (ODGJ) who potentially disrupt public order in Bandar Lampung City. Although the local government has implemented an ODGJ development program through the Social Service Office, various challenges remain regarding rehabilitation facilities, professional personnel, and social stigma, which may affect the effectiveness of the program in maintaining public order.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of the development program for People with Mental Disorders (ODGJ) in maintaining public order at the Social Service Office of Bandar Lampung City.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews with relevant informants, and documentation. The analysis was conducted using program effectiveness indicators, namely program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of objectives, and tangible changes.* ***Result:*** *The findings indicate that the ODGJ development program has been implemented relatively well across several dimensions. In terms of program understanding, implementers generally comprehend the objectives and procedures of the program. Regarding target accuracy, the program has reached individuals requiring rehabilitation and social guidance. In the timeliness dimension, activities have been carried out according to established procedures, although several limitations occasionally affect implementation. In achieving objectives, the program has contributed to reducing disturbances to public order caused by ODGJ and has improved their social behavior. Furthermore, tangible changes are reflected in the increased control of ODGJ behavior and the reduction of public complaints related to public disturbances. Nevertheless, limitations in rehabilitation facilities, shortages of professional personnel, the absence of specialized facilities at the city level, and persistent social stigma remain significant obstacles.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the ODGJ development program implemented by the Social Service Office of Bandar Lampung City has been effective in supporting public order, although its implementation has not yet reached an optimal level. It is recommended to strengthen policies, improve facilities and infrastructure, increase the availability of professional personnel, and enhance cross-sector collaboration to improve program effectiveness.*

Keywords: *Local Government; Mental Health; ODGJ Development; Program Effectiveness; Public Order.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di Kota Bandar Lampung. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan program pembinaan ODGJ, masih terdapat berbagai kendala berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, serta stigma masyarakat yang dapat memengaruhi efektivitas program dalam mendukung ketertiban umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam ketertiban umum di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan terkait, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan indikator efektivitas program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pembinaan ODGJ memiliki capaian yang cukup baik pada setiap dimensinya. Pada dimensi pemahaman program, pelaksana program telah memahami tujuan dan mekanisme pembinaan yang dilaksanakan. Pada dimensi ketepatan sasaran, program telah menjangkau ODGJ yang membutuhkan rehabilitasi dan pembinaan sosial. Pada dimensi ketepatan waktu, pelaksanaan kegiatan umumnya telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Pada dimensi pencapaian tujuan, program mampu membantu mengurangi gangguan ketertiban umum yang disebabkan oleh ODGJ serta meningkatkan perilaku sosial mereka menjadi lebih terkendali. Adapun pada dimensi perubahan nyata, terlihat adanya peningkatan kondisi sosial ODGJ serta berkurangnya keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, belum tersedianya sarana khusus di tingkat kota, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap ODGJ. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pembinaan ODGJ di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup efektif dalam mendukung ketertiban umum, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Adapun saran penelitian ini yaitu perlunya penguatan kebijakan, peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi, penambahan tenaga profesional, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas program pembinaan ODGJ.

Kata kunci: Efektivitas Program; Ketertiban Umum; Kesehatan Jiwa; Pembinaan ODGJ; Pemerintahan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif. Ketertiban yang terjaga memungkinkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik berjalan secara optimal. Administrasi yang efektif dimulai dengan perencanaan strategis yang solid (Madjid, 2023) Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum sekaligus administratif untuk menjamin terciptanya ketertiban umum melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada

pelayanan masyarakat (Andualem et al., 2024). Administrasi yang efektif dimulai dengan perencanaan strategis yang solid (Madjid, 2023)

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan ketertiban umum di daerah adalah keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di ruang publik. ODGJ merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan mental yang dialaminya dapat memengaruhi kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, ODGJ yang tidak memperoleh penanganan yang memadai dapat menimbulkan keresahan masyarakat, mengganggu kenyamanan lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Mamed et al., 2025). Oleh karena itu, penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga memerlukan pembinaan sosial, rehabilitasi, dukungan keluarga, serta keterlibatan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia masih menjadi isu yang serius. Menteri Kesehatan Republik Indonesia pernah menyampaikan bahwa sekitar satu dari sepuluh penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa, baik dalam kategori ringan maupun berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak lagi bersifat individual, tetapi telah menjadi permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian lintas sektor (Cuijpers et al., 2022). Selain menghadapi tantangan kesehatan, ODGJ juga sering memperoleh stigma negatif dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan label “orang gila” kepada ODGJ sehingga menyebabkan diskriminasi sosial dan menghambat proses pemulihan mereka.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Kasus ODGJ Berat di Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Jumlah Kasus ODGJ Berat (Jiwa)	Pertumbuhan Kasus (Jiwa)	Status Kasus di Masyarakat
1.	2021	1.832	—	Peningkatan Kasus Sektoral
2.	2022	1.875	+43	Tren Kenaikan Mobilitas
3.	2023	1.912	+37	Puncak Akumulasi Kasus
4.	2024	1.912	0	Kasus Stabil / Terkendali
5.	2025	1.931	+19	Penambahan Kasus Baru Terbina

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan **Tabel 1** Di Kota Bandar Lampung, permasalahan ODGJ masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Lampung, jumlah ODGJ berat mengalami peningkatan dari 1.832 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.931 jiwa pada tahun 2025. Meskipun pada tahun 2024 jumlah kasus relatif stabil, munculnya kasus baru pada tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan ODGJ masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan (Murphy et al., 2018). Berbagai kasus ODGJ yang berkeliaran di jalanan, pasar, terminal, maupun ruang publik lainnya menunjukkan bahwa keberadaan mereka dapat berdampak pada ketertiban umum apabila tidak ditangani secara tepat.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai program pembinaan ODGJ melalui kegiatan penjangkauan, rehabilitasi sosial, pendampingan, dan rujukan pelayanan kesehatan. Program tersebut

diharapkan mampu membantu pemulihan ODGJ sekaligus mengurangi potensi gangguan ketertiban umum di masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, belum tersedianya panti khusus ODGJ di tingkat kota (Sukiasyan, 2024), kurangnya tenaga profesional, serta masih kuatnya stigma masyarakat terhadap ODGJ.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian mengenai efektivitas program pembinaan ODGJ yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana program yang dijalankan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi terhadap terwujudnya ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan meningkatnya jumlah ODGJ di Kota Bandar Lampung yang berpotensi memengaruhi ketertiban umum, sementara pemerintah daerah telah melaksanakan program pembinaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan ODGJ yang berkeliaran di ruang publik serta berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pembinaan (Marthalina, 2018).

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas rehabilitasi medis dan psiko-sosial ODGJ di rumah sakit jiwa maupun program pemberdayaan berbasis keterampilan di tingkat komunitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi mampu membantu pemulihan kondisi mental dan meningkatkan kemandirian ODGJ. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek kesehatan dan pemberdayaan sosial tanpa mengaitkannya secara langsung dengan aspek ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah (Gunawan & Marthalia, 2025).

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait efektivitas program pembinaan ODGJ dalam konteks ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai institusi pemerintah daerah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas program pembinaan ODGJ dalam mendukung terciptanya ketertiban umum di Kota Bandar Lampung (Syaefullah et al., 2022).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris Prabowo, H. (2019). mengenai efektivitas program pembinaan ODGJ yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mendukung ketertiban umum. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, dan langkah perbaikan program pembinaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan informasi mengenai tingkat keberhasilan program pembinaan ODGJ yang telah dilaksanakan. Akibatnya, proses evaluasi dan pengambilan kebijakan berpotensi kurang tepat sasaran, sehingga berbagai permasalahan seperti meningkatnya jumlah ODGJ di ruang publik, keterbatasan layanan rehabilitasi, serta gangguan terhadap ketertiban umum dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis sebagai upaya mendukung terciptanya pelayanan sosial yang lebih baik sekaligus menjaga ketertiban umum di Kota Bandar Lampung (Harahap et al., 2025).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas penanganan dan pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dari berbagai perspektif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai ODGJ memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Rahma Hayati meneliti efektivitas program rehabilitasi psiko-sosial terhadap pemulihan

ODGJ di Berastagi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus. Penelitian tersebut berfokus pada peran rehabilitasi psiko-sosial dalam mendukung pemulihan mental, emosional, dan sosial ODGJ (Nahwa Zainab Marpaung & Rahma Hayati Harahap, 2025). Firmansyah Danukusumah, Suryani, dan Iwan mengkaji stigma masyarakat terhadap ODGJ menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi stigma masyarakat terhadap ODGJ dalam kehidupan social (Danukusumah et al., 2022).

Selanjutnya, Agusnuli Ayu Zizi meneliti peran Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Karimun menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi kasus, dan dokumentasi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran kelembagaan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada ODGJ terlantar (Zizi, 2023). Choiriah dan Anisyah Shinta mengkaji efektivitas program keterampilan dalam pembinaan rehabilitasi ODGJ di PR-PGOT Kelurahan Sukamaju Palembang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keterampilan mampu mendukung proses rehabilitasi sosial ODGJ meskipun masih terdapat berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaannya (Shinta et al., 2023).

Selain itu, Daulay, Wahyuni, dan Nasution melakukan penelitian mengenai kualitas hidup ODGJ melalui metode *systematic review* terhadap berbagai jurnal nasional dan internasional. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup ODGJ, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun lingkungan (Daulay et al., 2021).

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai ODGJ masih didominasi oleh pembahasan terkait rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, stigma masyarakat, kualitas hidup, serta peran kelembagaan dalam pelayanan sosial. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek pemulihan individu ODGJ. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas program pembinaan ODGJ dalam kaitannya dengan ketertiban umum sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut dengan menganalisis efektivitas program pembinaan ODGJ yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mendukung terciptanya ketertiban umum.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan program pembinaan ODGJ dengan aspek ketertiban umum sebagai salah satu fungsi pemerintahan daerah. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti rehabilitasi medis, rehabilitasi psiko-sosial, stigma masyarakat, kualitas hidup ODGJ, maupun peran Dinas Sosial dalam pelayanan sosial secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana efektivitas program pembinaan ODGJ dapat berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

Selain itu, penelitian ini memiliki karakteristik objek yang berbeda karena berfokus pada program pembinaan ODGJ yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan sosial dan penanganan permasalahan sosial di masyarakat. Dari segi analisis, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata untuk menilai tingkat keberhasilan program pembinaan ODGJ. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait efektivitas program sosial dalam mendukung ketertiban umum.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas Program Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mendukung terwujudnya ketertiban umum di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena efektivitas Program Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menjaga ketertiban umum di Kota Bandar Lampung tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan program, persepsi para pelaksana dan penerima manfaat, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan program pembinaan ODGJ. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif sehingga analisis dilakukan berdasarkan fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan menerapkan triangulasi metode. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam terkait efektivitas program pembinaan ODGJ. Observasi dilakukan secara terus terang terhadap pelaksanaan program, kondisi ODGJ, serta situasi ketertiban umum di lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, peraturan daerah, data statistik ODGJ, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, snowball sampling, dan kuota sampling. Informan terdiri atas Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan ODGJ. Informan lainnya meliputi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, pekerja sosial (Peksos), pegawai bidang perlindungan sosial, masyarakat, keluarga ODGJ, serta perawat rumah asuh. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan program pembinaan ODGJ sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah, pekerja sosial, keluarga ODGJ, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan berdasarkan indikator efektivitas program menurut Sutrisno yang terdiri atas pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Melalui tahapan tersebut, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis tingkat efektivitas program pembinaan ODGJ dalam mendukung ketertiban umum.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembinaan ODGJ. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2026, yang meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, wawancara informan, dokumentasi, serta analisis data penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas Program Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010). Menurut Sutrisno, efektivitas program dapat diukur melalui lima dimensi utama yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata (outcome). Kelima dimensi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana Program Pembinaan ODGJ mampu mendukung rehabilitasi sosial ODGJ sekaligus menjaga ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

Sebagai Gambaran awal, pada **Tabel 2** berikut menyajikan ringkasan temuan penelitian, faktoer penghambat serta Upaya yang di lakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan kelima dimensi yang telah di gunakan peneliti. Penjelasan lebih menadalam terakit masin-masing dimensi diuraikan pada subbas selanjutnya.

Tabel 2.
Ringkasan Hasil dan Pembahasan Efektivitas Program Pembinaan ODGJ dalam Ketertiban Umum di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

No	Dimensi Efektivitas	Temuan/Hasil	Faktor Penghambat	Upaya/Saran Mengatasi Hambatan
1	Pemahaman Program	• Tingkat pemahaman berjalan sangat baik di tingkat instansi pelaksana program • Pelaksana telah memahami tujuan rehabilitasi sosial dan mekanisme pembinaan	• Sebagian masyarakat masih menganggap program ini sebatas penertiban/pemindahan ODGJ dari jalanan saja • Media sosialisasi (banner, spanduk, brosur) masih sangat terbatas.	• Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat secara masif dan merata
2	Ketepatan Sasaran	• Penentuan sasaran tergolong baik karena menggunakan mekanisme laporan warga, penjangkauan rutin, dan asesmen profesional	• Banyak ODGJ di jalanan tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas • Pihak keluarga cenderung menyembunyikan anggota keluarga yang ODGJ karena malu/stigma	• Penguatan sistem pendataan terpadu dan integrasi data kependudukan antarinstansi terkait
3	Ketepatan Waktu	• Secara umum pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi telah berjalan sesuai	• Proses rujukan dari lapangan ke tempat rehabilitasi memakan waktu lama karena kendala verifikasi	• Sinkronisasi dan peningkatan koordinasi lintas sektor agar alur pelayanan administrasi

		dengan prosedur yang ditetapkan.	administrasi dan jaminan kesehatan . • Sinkronisasi koordinasi antarinstansi (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RS, rumah singgah) belum optimal.	menjadi lebih cepat dan efisien
4	Pencapaian Tujuan	• Target tercapai dengan baik: ODGJ mengalami perubahan perilaku menjadi tenang, adaptif, dan penurunan gangguan ketertiban di ruang publik	• Keterbatasan kapasitas fasilitas rehabilitasi dan rumah singgah di tingkat kota . • Kurangnya tenaga profesional	• Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kebijakan, peningkatan sarana prasarana, serta penambahan tenaga profesional.
5	Perubahan Nyata (Outcome)	• Meningkatnya stabilitas emosional dan kemandirian ODGJ dalam aktivitas harian/produktif . • Berkurangnya keluhan warga serta membaiknya penerimaan hubungan sosial.	• Masih tingginya stigma negatif sosial masyarakat ("orang gila") yang memicu diskriminasi dan penolakan terselubung . • Kurangnya pengetahuan keluarga terkait pendampingan ODGJ pascarehabilitasi.	• Mengembangkan program pendampingan khusus bagi keluarga serta menggalakkan edukasi inklusi sosial di lingkungan masyarakat

Sumber: Diolah Penulis (2026)

3.1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan indikator awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program. Semakin baik tingkat pemahaman masyarakat maupun pelaksana program terhadap tujuan dan mekanisme program, maka semakin besar peluang program tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Untuk melihat peta kedalaman pemahaman dari para informan, berikut disajikan **Tabel 3** hasil kodifikasi data menggunakan NVivo terkait dimensi pemahaman program:

Tabel 3.
Hasil Analisis NVivo: Dimensi Pemahaman Program

No	Node / Tema Utama	Jumlah Sumber (Sources)	Jumlah Referensi Coding (References)	Persentase (%)	Indikator Empiris di Lapangan
1	Pemahaman Internal Pelaksana	3 Informan	5	55,5%	Struktur pelaksana paham SOP alur penanganan dan fungsi rehabilitasi secara holistik.
2	Pemahaman Masyarakat (Parsial)	2 Informan	4	44,5%	Warga menganggap program hanya sebatas penertiban/pembersihan ODGJ dari jalanan.
Total			9	100%	

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diketahui bahwa Program Pembinaan ODGJ bertujuan memberikan rehabilitasi sosial kepada ODGJ agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal di tengah masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami program ini hanya sebagai kegiatan penertiban ODGJ yang berada di ruang publik.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyatakan:

"Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa program ini hanya memindahkan ODGJ dari jalanan. Padahal setelah penjangkauan masih ada proses rehabilitasi, pendampingan, hingga reintegrasi sosial."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung. Ketika terdapat ODGJ yang berkeliaran di lingkungan permukiman, sebagian masyarakat langsung melaporkan kepada aparat tanpa memahami proses rehabilitasi yang akan dilakukan setelah penjangkauan. Masyarakat cenderung menganggap ODGJ sebagai sumber gangguan ketertiban umum semata. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa media sosialisasi seperti banner, spanduk, dan brosur mengenai mekanisme pembinaan ODGJ masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai tujuan program belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dimensi pemahaman program telah berjalan cukup baik di tingkat pelaksana, namun belum optimal pada tingkat masyarakat. Masih diperlukan peningkatan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa program pembinaan tidak hanya bertujuan melakukan penertiban, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial ODGJ.

3.2 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran menunjukkan sejauh mana program diberikan kepada kelompok yang benarbenar membutuhkan pelayanan. Dalam konteks penelitian ini, sasaran program adalah ODGJ yang memerlukan pembinaan, rehabilitasi sosial, dan penanganan untuk mendukung ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial (Peksos), penentuan sasaran dilakukan melalui laporan masyarakat, hasil penjangkauan lapangan, serta asesmen profesional yang dilakukan oleh tim sosial. Adapun hasil pemetaan berkas wawancara dan observasi menggunakan alat bantu NVivo untuk dimensi ketepatan sasaran dapat dilihat pada **Tabel 4** berikut:

Tabel 4.
Hasil Analisis NVivo: Dimensi Ketepatan Sasaran

No	Node / Tema Utama	Jumlah Sumber (Sources)	Jumlah Referensi Coding (References)	Persentase (%)	Indikator Empiris di Lapangan

1	Mekanisme Asesmen & Penjangkauan	4 Informan	6	60,0%	Tim peksos melakukan skrining ketat langsung di lokasi ruang publik/laporan warga.
2	Kendala Identitas & Stigma Keluarga	2 Informan	4	40,0%	ODGJ tidak memiliki KTP/keluarga menyembunyikan karena merasa malu.
Total			**10**	**100%**	

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Pekerja sosial menyampaikan:

"Kami melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memastikan bahwa individu yang ditangani memang membutuhkan rehabilitasi sosial dan penanganan lebih lanjut."

Hasil observasi menunjukkan bahwa tim lapangan secara rutin melakukan penjangkauan terhadap ODGJ yang berada di pasar, terminal, persimpangan jalan, dan ruang publik lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam menentukan sasaran secara tepat, terutama karena banyak ODGJ yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Peneliti juga menemukan bahwa sebagian ODGJ yang berada dalam lingkungan keluarga belum teridentifikasi karena keluarga cenderung menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa akibat rasa malu maupun stigma sosial.

Dokumentasi yang diperoleh menunjukkan bahwa proses asesmen telah dilakukan sesuai prosedur sehingga sasaran utama program relatif tepat. Namun demikian, keterbatasan data dan belum terintegrasinya sistem pendataan antarinstansi masih menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh ODGJ yang membutuhkan layanan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran Program Pembinaan ODGJ tergolong baik karena telah menggunakan mekanisme asesmen profesional. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan sistem pendataan agar cakupan sasaran dapat lebih optimal.

3.3 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan ukuran efektivitas yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil ekstraksi teks wawancara dan transkrip operasional menggunakan program NVivo, diperoleh rincian rujukan coding ketepatan waktu dapat dilihat pada **Tabel 5** berikut:

Tabel 5.

Hasil Analisis NVivo: Dimensi Ketepatan Waktu

No	Node / Tema Utama	Jumlah Sumber (Sources)	Jumlah Referensi Coding (References)	Persentase (%)	Indikator Empiris di Lapangan
1	Kesesuaian SOP Pelayanan	3 Informan	4	44,4%	Pelaksanaan tindakan penanganan darurat di lapangan berjalan responsif.
2	Hambatan Birokrasi & Lintas Sektor	3 Informan	5	55,6%	Lamanya verifikasi BPJS/kesehatan dan antrean koordinasi antar-lembaga.
Total			**9**	**100%**	

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Pembinaan ODGJ secara umum telah berjalan sesuai prosedur. Namun demikian, beberapa tahapan sering mengalami keterlambatan karena berbagai faktor administratif maupun kondisi kesehatan ODGJ yang memerlukan penanganan khusus.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menjelaskan:

"Terkadang proses penanganan harus menyesuaikan kondisi kesehatan ODGJ dan kesiapan fasilitas rehabilitasi sehingga jadwal yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian."

Hasil observasi menunjukkan bahwa proses rujukan dari lokasi penjangkauan menuju fasilitas rehabilitasi sering memerlukan waktu yang cukup lama. Penundaan biasanya terjadi pada tahap verifikasi administrasi, pengurusan jaminan kesehatan, serta koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan rumah singgah masih membutuhkan sinkronisasi yang lebih baik agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa meskipun terjadi beberapa keterlambatan, seluruh tahapan pelayanan tetap dapat diselesaikan hingga proses rehabilitasi berjalan sesuai standar pelayanan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ketepatan waktu program berada pada kategori cukup efektif. Program tetap terlaksana dengan baik, namun diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor agar waktu pelayanan menjadi lebih efisien.

3.4 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan utama Program Pembinaan ODGJ adalah meningkatkan fungsi sosial ODGJ serta menciptakan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung. Hasil analisis kluster kata dan *coding data* menggunakan NVivo pada dimensi ini menunjukkan hasil yang dominan pada aspek keberhasilan program, sebagaimana termuat pada **Tabel 6** di bawah ini:

Tabel 6.
Hasil Analisis NVivo: Dimensi Pencapaian Tujuan

No	Node / Tema Utama	Jumlah Sumber (Sources)	Jumlah Referensi Coding (References)	Persentase (%)	Indikator Empiris di Lapangan
1	Perubahan Perilaku & Ketertiban	5 Informan	8	66,7%	ODGJ menjadi lebih tenang, berkurangnya keluhan gangguan ketertiban di jalanan.
2	Keterbatasan Sarpras & Tenaga	3 Informan	4	33,3%	Daya tampung rumah singgah terbatas, tenaga spesialis kejiwaan minim.
Total			**12**	**100%**	

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut sebagian besar telah tercapai. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial menunjukkan bahwa banyak ODGJ yang mengalami perubahan perilaku setelah menjalani rehabilitasi sosial. Mereka menjadi lebih tenang, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan tidak lagi melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

Seorang pekerja sosial menyampaikan:

"Setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, sebagian besar ODGJ menunjukkan perkembangan yang positif. Mereka lebih mudah diajak berkomunikasi dan mampu mengikuti kegiatan sehari-hari."

Temuan tersebut diperkuat melalui observasi yang dilakukan peneliti di rumah singgah dan pusat rehabilitasi. Peneliti melihat bahwa para penerima manfaat mengikuti berbagai kegiatan seperti terapi psikososial, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan sederhana, dan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat yang diwawancarai juga mengakui adanya penurunan jumlah gangguan ketertiban yang disebabkan oleh ODGJ di lingkungan mereka.

Dokumentasi kegiatan rehabilitasi menunjukkan adanya keterlibatan aktif ODGJ dalam berbagai program pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan sosial dan kemandirian mereka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tujuan Program Pembinaan ODGJ telah tercapai dengan baik. Program mampu mendukung pemulihan fungsi sosial ODGJ sekaligus menciptakan kondisi lingkungan yang lebih tertib dan aman.

3.5 Perubahan Nyata (*Outcome)*

Perubahan nyata merupakan indikator akhir yang digunakan untuk melihat dampak program terhadap penerima manfaat dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan *nodes* yang disusun dalam NVivo, impak dari keberadaan program ini terekam ke dalam beberapa poin capaian utama dapat dilihat pada **Tabel 7** berikut:

Tabel 7.

Hasil Analisis NVivo: Dimensi Perubahan Nyata (*Outcome*)

No	Node / Tema Utama	Jumlah Sumber (Sources)	Jumlah Referensi Coding (References)	Persentase (%)	Indikator Empiris di Lapangan
1	Peningkatan Kemandirian ODGJ	4 Informan	6	54,5%	Mampu melakukan aktivitas harian mandiri, berkomunikasi baik, dan produktif.
2	Reintegrasi & Penerimaan Sosial	3 Informan	5	45,5%	Keluarga merasa terbantu, gesekan sosial di tengah masyarakat menurun.
Total			**11**	**100%**	

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan yang paling terlihat setelah pelaksanaan program adalah meningkatnya stabilitas emosional ODGJ, kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, serta meningkatnya kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Salah satu anggota keluarga ODGJ menyampaikan:

> *"Setelah mengikuti pembinaan, kondisi anggota keluarga kami jauh lebih baik. Sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi mengamuk seperti sebelumnya."*

Observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa beberapa mantan ODGJ telah mampu berpartisipasi dalam aktivitas produktif seperti membersihkan lingkungan, berkebun, dan membantu pekerjaan sederhana di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain perubahan pada individu ODGJ

dampak positif juga dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga merasa lebih tenang karena kondisi anggota keluarganya membaik, sedangkan masyarakat mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap keberadaan ODGJ yang telah menjalani rehabilitasi.

Hasil dokumentasi memperlihatkan adanya peningkatan interaksi sosial antara ODGJ dengan masyarakat sekitar setelah proses rehabilitasi selesai dilakukan. Meskipun stigma sosial masih ditemukan di beberapa lingkungan, tingkat penerimaan masyarakat terhadap ODGJ menunjukkan tren yang semakin baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Program Pembinaan ODGJ telah menghasilkan perubahan nyata yang positif.

Program tidak hanya berdampak pada perbaikan kondisi individu ODGJ, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan sosial antara ODGJ, keluarga, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan lima dimensi efektivitas menurut Sutrisno (2010), Program Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat dikategorikan efektif. Dimensi pencapaian tujuan dan perubahan nyata menunjukkan hasil yang paling kuat, sedangkan dimensi pemahaman program, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu masih memerlukan perbaikan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan sistem pendataan, serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup ODGJ sekaligus mendukung terciptanya ketertiban umum di Kota Bandar Lampung.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan rehabilitasi individu, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa indikator pencapaian tujuan dan perubahan nyata menjadi aspek yang paling menonjol dalam pelaksanaan program. ODGJ yang telah mengikuti pembinaan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih stabil, mampu berkomunikasi dengan lebih baik, serta memiliki tingkat kemandirian yang meningkat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sama halnya dengan temuan penelitian Rahma Hayati (2025) yang menyatakan bahwa rehabilitasi psiko-sosial memiliki peran penting dalam pemulihan mental, emosional, dan sosial ODGJ, penelitian ini juga menemukan bahwa proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membantu ODGJ memperoleh kembali fungsi sosialnya di masyarakat. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa stigma masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan ODGJ. Meskipun sebagian masyarakat mulai menerima keberadaan ODGJ yang telah pulih, masih terdapat persepsi negatif yang menyebabkan proses reintegrasi sosial belum berjalan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah Danukusumah, Suryani, dan Iwan (2022) yang menemukan bahwa stigma masyarakat merupakan faktor yang memengaruhi penerimaan sosial terhadap ODGJ. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya karena masih ditemukan sikap menjaga jarak dan penolakan terselubung terhadap mantan ODGJ di beberapa lingkungan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Agusnuli Ayu Zizi (2023) yang lebih menitikberatkan pada peran kelembagaan Dinas Sosial dalam pelayanan ODGJ terlantar, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan program pembinaan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas program tidak hanya bergantung pada kinerja satu instansi, tetapi memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Choiriah dan Anisyah Shinta (2023) yang menyatakan bahwa program pembinaan dan keterampilan dapat membantu meningkatkan kemampuan sosial ODGJ. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa ODGJ yang telah menjalani pembinaan mampu mengikuti kegiatan produktif seperti bercocok tanam, menjaga kebersihan lingkungan, serta membantu aktivitas sederhana di tempat rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan fungsional ODGJ.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada keterkaitan antara efektivitas Program Pembinaan ODGJ dengan upaya mendukung ketertiban umum. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada rehabilitasi, stigma sosial, dan kualitas hidup ODGJ, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan juga berdampak pada berkurangnya gangguan ketertiban umum yang disebabkan oleh ODGJ terlantar di ruang publik. Dengan demikian, program pembinaan ODGJ tidak hanya memiliki nilai sosial dan kemanusiaan, tetapi juga mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Secara keseluruhan, beberapa temuan penting penelitian ini antara lain:

a. Program pembinaan mampu meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian ODGJ;
b. Program berkontribusi dalam menciptakan ketertiban umum melalui berkurangnya ODGJ terlantar di ruang publik;
c. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program;
d. Keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan proses rehabilitasi;
e. Stigma masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam proses reintegrasi sosial ODGJ;
f. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kesehatan jiwa diperlukan untuk mendukung penerimaan sosial yang lebih inklusif.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas Program Pembinaan ODGJ di Kota Bandar Lampung. Faktor pertama adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan rumah singgah yang menyebabkan kapasitas pelayanan belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan penanganan ODGJ secara optimal. Faktor kedua adalah keterbatasan jumlah tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, dan pekerja sosial yang mengakibatkan beban kerja pelaksana program menjadi cukup tinggi. Kondisi ini berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada ODGJ.

Selain itu, penulis juga menemukan bahwa sistem pendataan ODGJ antarinstansi belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, proses identifikasi sasaran, pemantauan perkembangan, dan koordinasi layanan masih menghadapi berbagai hambatan administratif. Temuan menarik lainnya adalah masih rendahnya pemahaman sebagian keluarga mengenai penanganan ODGJ pascarehabilitasi. Banyak keluarga yang merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendampingi anggota keluarga yang telah kembali ke lingkungan rumah. Oleh karena itu, program pendampingan keluarga menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung keberlanjutan pemulihan ODGJ.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Program Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah berjalan efektif dalam mendukung pemulihan fungsi sosial ODGJ dan mewujudkan ketertiban umum di masyarakat. Efektivitas program terlihat melalui tercapainya tujuan rehabilitasi, meningkatnya kemampuan sosial dan kemandirian ODGJ, serta munculnya perubahan nyata yang dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi lintas sektor, penambahan fasilitas rehabilitasi, serta pengurangan stigma sosial masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada Program Pembinaan ODGJ di Kota Bandar Lampung. Selain itu, keterbatasan

waktu penelitian menyebabkan proses pengamatan terhadap perkembangan jangka panjang ODGJ pascarehabilitasi belum dapat dilakukan secara mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program pembinaan ODGJ pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda serta menganalisis keberlanjutan proses reintegrasi sosial ODGJ setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif dalam mendukung pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung beserta seluruh jajaran, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial, pekerja sosial, keluarga ODGJ, masyarakat, serta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan, dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian berlangsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andualem, F., Melkam, M., Takelle, G. M., Nakie, G., Tinsae, T., Fentahun, S., Rtbey, G., Begashaw, T. D., Seid, J., Tegegn, L. F., Gedef, G. M., Bitew, D. A., & Godana, T. N. (2024). Prevalence of posttraumatic stress disorder and associated factors among displaced people in Africa: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, *15*, Artikel 1336665. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1336665

Cuijpers, P., Heim, E., Ramia, J. A., Burchert, S., Carswell, K., Cornelisz, I., Knaevelsrud, C., Noun, P., van Klaveren, C., van't Hof, E., Zoghbi, E., van Ommeren, M., & Chammay, R. El. (2022). Effects of a WHO-guided digital health intervention for depression in Syrian refugees in Lebanon: A randomized controlled trial. *PLoS Medicine*, *19*(6), Artikel e1004025. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004025

Danukusumah, F., Suryani, S., & Shalahuddin, I. (2022). Stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, *11*(3), 201–210. https://doi.org/10.33221/jikm.v11i03.1403

Daulay, W., Wahyuni, S. E., & Nasution, M. L. (2021). Kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa: Systematic review. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, *9*(1), 187–196. https://doi.org/10.26714/jkj.9.1.2021.187-196

Gunawan, B., & Marthalia, L. (2025). Kajian literatur tentang strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. *Educational Journal of Islamic Management*, *5*(1), 11–22. https://doi.org/10.47709/ejim.v5i1.6003

Harahap, R. H., Marpaung, N. Z., Sihombing, F. J. H., Khairany, & Putri, A. (2025). Peranan program rehabilitas psiko-sosial terhadap pemulihan ODGJ di Berastagi. *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*, *4*(1), 32–43. https://talenta.usu.ac.id/is/article/view/19998/8898

Madjid, U, Muhammad Ghifari Iksan, A. S. (2025). *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/20029?issue=Jurnal%20Pemerintahan%20dan%20Keamanan%20Publik%20(JP%20dan%20KP)%20Vol.%207,%20No.%202,%20Agustus%202025

Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in digital-based public services in regional government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *16*(1), 51–64. https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778

Madjid, U., & Zaenal, A. A. (2022). Pembangunan partisipasi dan demokrasi lokal di Kabupaten Bandung Barat. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *8*(1), 12–25. https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/6710

Mamed, G. E., Tefera, G. M., Bitew, M., & Yu, M. (2025). The overlooked war in Northern Ethiopia: Examining psychological capital, mental distress, and post-traumatic stress disorder among internally displaced people in Amhara region. *International Journal of Social Psychiatry*, *71*(4), 312–325. https://doi.org/10.1177/00207640241299357

Marthalina, M. (2018). Peran pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *10*(1), 33–48. https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403

Murphy, A., Chikovani, I., Uchaneishvili, M., Makhashvili, N., & Roberts, B. (2018). Barriers to mental health care utilization among internally displaced persons in the republic of Georgia: A rapid appraisal study. *BMC Health Services Research*, *18*(1), Artikel 311. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3113-y

Marpaung, N. Z., & Harahap, R. H. (2025). Efektivitas program rehabilitas psiko-sosial terhadap pemulihan ODGJ di Berastagi. *Jurnal Intervensi Sosial*, *4*(1), 1–10. https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v4i1.19998

Prabowo, H. (2019). Influence of implementation of development and supervision policy to the effectiveness of regional autonomy in Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 11(1), 63–73. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.63-73

Prabowo, H., Indrayani, E., Rusfiana, Y., & Sinaga, O. (2022). Development of local government capacity in managing Indonesia-Malaysia border area (Study on Sebatik Island). Croatian International Relations Review, 28(90), 18–37. https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-002

Shinta, A., Choiriah, C., & Noviza, N. (2023). Efektivitas program ketrampilan dalam pembinaan rehabilitasi ODGJ di PR-PGOT Kelurahan Sukamaju Palembang. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, *2*(1), 730–734. https://doi.org/10.62379/jishs.v2i1.1023

Sukiasyan, S. G. (2024). The mental health of refugees and forcibly displaced people: A narrative review. *Consortium Psychiatricum*, *5*(4), 45–58. https://doi.org/10.17816/CP15552

Syaefullah, S., Darmawan, A., & Rudi, V. (2022). Local government innovation in implementing mandatory authorities in the Health Office Central Lombok District. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *2*(7), 1320–1329. https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i7.532

Zizi, A. A. (2023). Peran dinas sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kabupaten Karimun. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *7*(1), 85–96. http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v8i1.18459

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1972